DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON
Alamat : Jln. Sunan Bonang No. 01 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865
SUMBER 45611

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

Nomor : 02 Tahun 2002

TENTANG

PENETAPAN PROGRAM KERJA TAHUNAN DPRD
KABUPATEN CIREBON TAHUN SIDANG 2002

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan terarahnya pelaksanaan tugas DPRD dalam Tahun Sidang 2002, dipandang perlu menyusun Program Kerja Tahunan;

b. bahwa Program Kerja Tahunan DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan DPRD.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);

2. Keputusan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 1999 tanggal 16 Oktober 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon.

Memperhatikan : Pembicaraan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Cirebon tanggal 28 Januari 2002.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Program Kerja Tahunan DPRD Kabupaten Cirebon Tahun Sidang 2002 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Program Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama, menjadi pedoman DPRD di dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tugas kerjanya untuk Tahun Sidang 2002.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai akhir Tahun Sidang 2002, dengan ketentuan apabila dipandang perlu akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di S u m b e r
Pada tanggal 28 Januari 2002

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON
Ketua,

KETUA DPRD KABUPATEN CIREBON

H. MASKUB BUNTORO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Yth. Bupati Cirebon.
2. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN CIREBON
Nomor : 02 Tahun 2002
Tanggal 28 Januari 2002

PROGRAM KERJA DPRD KABUPATEN CIREBON
TAHUN SIDANG 2002

TRIWULAN I (JANUARI 2002 s/d MARET 2002)

1. Pembukaan Tahun Sidang 2002 dan Penyampaian Evaluasi Kegiatan Hasil Kerja DPRD Tahun 2001;
2. Pembentukan Alat Kelengkapan DPRD dan Rencana Kerja Tahunan, Tahun 2002;
3. Pembahasan Perhitungan APBD Tahun 2001;
4. Pertanggung jawaban Bupati Tahun 2001;
5. Rapat Kerja dan Peninjauan dalam Daerah Kabupaten Cirebon oleh Alat Kelengkapan DPRD;
6. Rapat-rapat Intern Alat Kelengkapan DPRD;
7. Pembahasan Peraturan Daerah.

MATERI-MATERI PERMASALAHAN DAN KEGIATAN

A. BIDANG PEMERINTAHAN

1. BIDANG PEMERINTAHAN : Masalah Rencana Pemilihan Kepala Desa;
Masalah Penyelesaian Batas Antar Desa;
Masalah Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pengaduan Masyarakat;
Evaluasi JPS bidang Pengembangan Kecamatan;
Masalah Pemantauan pelaksanaan Perangkat Lunak/Dinas/Instansi

2. KEAMANAN DAN KETERTIBAN : Masalah Pembinaan KAMTIBMAS;
Masalah Pemerintahan Desa/Kelurahan;
Masalah Antisipasi Unjuk Rasa
Masalah Pencegahan dan Penyelesaian Tawuran Antar Desa.

3. KEPENDUDUKAN : Masalah Kependudukan;
Masalah Penduduk Miskin dan Desa Tertinggal (A/E)
Masalah Pembinaan dan Peningkatan Keluarga Pra KS.

4. PENERANGAN DAN MEDIA MASSA : Masalah Peran Sturada sebagai Media Pemda;
Masalah Eksistensi Radio Swasta Daerah dan Pembinaannya;
Masalah KIK.

5. HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN : Masalah Sosialisasi dan Penggandaan Produk Hukum Daerah/Perda;
Masalah Pelayanan Bantuan Hukum;
Masalah Perlindungan Hak Azasi Manusia;
Masalah Desa Sadar Hukum.

6. KEPEGAWAIAN DAN APARATUR : Masalah Pembinaan Wredatama dan Keluarga Pegawai;
Masalah Pelaksanaan GDN;
Masalah Penerimaan Calon PNS;
Masalah Diklat dan Pembinaan Pegawai.

7. PERIZINAN : Masalah PAD dan Perijinannya.

8. PERTANAHAN :
- Tanah asset Pemda;
- Tanah asset Pemdes;
- Status tanah swapraja.

Masalah Pemanfaatan Lahan Tidur;

9. SOSIAL POLITIK : Masalah Dampak Sosial Politik dari Situasi Krisis Moneter/Ekonomi/Politik;

10. PEMBANGUNAN DESA : Masalah Pembinaan Lembaga-lembaga Desa dan Kelurahan;

B. BIDANG PEREKONOMIAN

1. Evaluasi JPS Program Ketahanan Pangan;
2. Evaluasi JPS Program Pemberdayaan Ekonomi Rakyat;
3. Evaluasi Kerja 2001 dan Program Kerja 2002 Perkoperasian;
4. Evaluasi Kerja 2001 dan Program Kerja 2002 Perdagangan Industri;
5. Evaluasi Kerja 2001 dan Program Kerja 2002 Pertanian Tanaman Pangan;
6. Evaluasi Kerja 2001 dan Program Kerja 2002 Perkebunan;
7. Evaluasi Kerja 2001 dan Program Kerja 2002 Peternakan;
8. Evaluasi Kerja 2001 dan Program Kerja 2002 Perikanan;
9. Evaluasi Kerja 2001 dan Program Kerja 2002 Kepariwisataan;
10. Masalah Gejolak Moneter dan Krisis Ekonomi;

11. Masalah Sembilan Bahan Pokok (SEMBAKO);
12. Masalah Palagung;

C. BIDANG KEUANGAN DAN PERUSAHAAN DAERAH

1. Evaluasi masalah penerimaan PADS 2001 dan Rencana Penerimaan 2002.
2. Masalah Pengelolaan Terminal.
3. Masalah Uji Kelayakan Kendaraan Bermotor.
4. Masalah Retribusi Parkir.
5. Masalah Penerimaan PBB.
6. Masalah Rencana Pengelolaan Pasar Desa oleh Pemda.
7. Masalah Perkembangan PD BPR.
8. Masalah Perkembangan PDAM.
9. Masalah Pajak Penerangan Jalan.
10. Masalah Penerimaan Lain-lain.
11. Masalah Perkembangan Retribusi Pasar.
12. Masalah Pajak Air Bawah Tanah.

D. BIDANG PEMBANGUNAN

1. Evaluasi JPS Program Padat Karya;
2. Evaluasi Program Pelestarian Sumberdaya Alam dan Konservasi Tanah;
3. Evaluasi Program SD / MI;
4. Evaluasi Program Kesehatan/Dinas Kesehatan;
5. Evaluasi Program Lingkungan Hidup;
6. Evaluasi Program Pembangunan Perumahan Rakyat;
7. Evaluasi Program Rencana Tata Ruang Wilayah;
8. Evaluasi Kerja 2001 dan Program Kerja 2002 P3A Mitra Cai;
9. Masalah Perencanaan Program Pembangunan Tahun 2002/2003;
10. Masalah Perencanaan Bidang Pertambangan dan Energi.

E. BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

1. Evaluasi JPS Program Padat Karya dan Penciptaan Lapangan Kerja Produktif;
2. Evaluasi JPS Program Pemberdayaan Ekonomi Rakyat;
3. Evaluasi dan Program Kerja masalah Ketenagakerjaan;
4. Evaluasi dan Program kerja masalah Pendidikan, masalah Pelaksanaan EBTA;
5. Evaluasi dan Program kerja masalah IPTEK;
6. Evaluasi dan Program kerja masalah Kepemudaan dan Pramuka;
7. Evaluasi dan Program kerja masalah Olah Raga;
8. Evaluasi dan Program kerja masalah pembinaan kehidupan beragama secara umum dan Pemberangkatan/ Pemulangan Jamaah Haji serta pelaksanaan MTQ dan masalah zakat/infaq/shodaqoh;
9. Evaluasi dan Program kerja masalah Kebudayaan;

10. Evaluasi dan Program kerja masalah Sosial;
10. Evaluasi dan Program kerja masalah Kesejahteraan dan Keluarga Berencana;
12. Evaluasi dan Program kerja masalah Pemberdayaan Wanita;
13. Evaluasi dan Program kerja masalah Transmigrasi;
14. Evaluasi dan Program kerja masalah Kesehatan.

TRIWULAN II (APRIL 2002 S/D JUNI 2002)

1. Laporan Realisasi APBD Triwulan I Tahun Anggaran 2002.
2. Peringatan Hari Jadi Kabupaten Cirebon ke 520.
3. Rapat-Rapat Kerja dan Peninjauan dalam Daerah Kabupaten Cirebon oleh Alat Kelengkapan DPRD.
4. Rapat-Rapat Intern oleh Alat-alat kelengkapan DPRD.
5. Pembahasan Peraturan Daerah.
6. Pembahasan dan Penyelesaian Laporan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2001.

MATERI-MATERI PERMASALAHAN DAN KEGIATAN

A. BIDANG PEMERINTAHAN

1. PEMERINTAHAN	: Masalah Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa; Masalah Peningkatan Pengawasan Reguler dan Non Reguler; Masalah Peningkatan Otonomi Daerah; Masalah Pembinaan Peningkatan Otonomi Desa.
2. KEAMANAN DAN KETERTIBAN	: Masalah Pelaksanaan K3; Masalah Pembinaan SISKAMLING Masalah Peningkatan kemampuan HANSIP.
3. KEPENDUDUKAN	: Masalah Administrasi KK, KTP dan Pencatatan Penduduk.
4. PENERANGAN DAN MEDIA MASSA	: Masalah Pembinaan Pers di Daerah; Masalah Persiapan Pelaksanaan Hari Jadi Kabupaten Cirebon yang ke 520
5. HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	: Masalah Pendayagunaan PPNS dan Tim Yustisi; Masalah Pembinaan Ketertiban Lalu Lintas (A/D); Masalah Pembenahan Perda.

6. KEPEGAWAIAN DAN APARATUR : Masalah Program Peningkatan Kelembagaan dan Aparatur;

7. PERIZINAN : Masalah Mekanisme / Prosedur Pemberian Ijin :
   - Ijin Tempat Usaha;
   - Ijin Gangguan.

8. PERTANAHAN : Masalah Tanah Aset Desa.
   Masalah Tanah Aset Pemda.

9. SOSIAL POLITIK : Masalah Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan (A/E);

10. PEMBANGUNAN DESA : Masalah Peningkatan Swadaya Masyarakat (Upaya pemberdayaan Masyarakat Perdesaan).
    Masalah Eksistensi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Pembinaannya.

B. BIDANG PEREKONOMIAN

1. Pembinaan dan Pengembangan Koperasi/KUD dan Pengusaha Kecil.
2. Pembinaan dan Pengembangan Usaha Industri Kecil.
3. Program Peningkatan Pertanian Rakyat Terpadu.
4. Rencana Penanaman Padi MT 2002 dan Rencana Tanam Tebu 2002.
5. Pembinaan Pasca Panen Padi dan Masa Giling Tebu 2002.
6. Masalah Pemeliharaan Tanaman Hutan Rakyat/Penghijauan.
7. Pembinaan dan Peningkatan Produksi Perikanan.
8. Masalah Liberalisasi dan Perdagangan Bebas.
9. Masalah Tanaman Palawija.
10. Masalah Giling Tebu.

C. BIDANG KEUANGAN DAN PERUSAHAAN DAERAH

1. Evaluasi Penerimaan PADS Triwulan I.
2. Masalah Penerimaan PBB.
3. Masalah Retribusi Rumah Potong Hewan.
4. Masalah Penerimaan Pajak Pengambilan Galian C.
5. Masalah Penerimaan Pajak Hiburan dan Tontonan.
6. Masalah IMB Murni dan Pemutihan.
7. Masalah Pengembangan PDAM dengan Bantuan Modal Luar Negeri.
8. Masalah Penerimaan Pajak Reklame.
9. Masalah Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran.
10. Masalah Penerimaan Pajak Hasil Usaha Sarang Burung Walet.

11. Masalah Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga.

D. BIDANG PEMBANGUNAN

1. Evaluasi Program Kantor Bina Marga dan Kantor Cipta Karya.
2. Evaluasi Program Kantor Pengairan.
3. Rencana Tata Ruang Pertamanan.
4. Rencana Pelaksanaan Proyek-Proyek Pembangunan 2002.
5. Masalah Penataan Kota-kota Strategis.
6. Evaluasi Program Kantor Kebersihan dan Pertamanan.
7. Evaluasi Program KIP.
8. Peningkatan Jangkauan Pelayanan Air Bersih Pedesaan.

E. BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

1. Masalah Ketenaga Kerjaan .
2. Masalah Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2002/2003.
3. Evaluasi keberhasilan MTQ di Tingkat Propinsi Jabar TH. 2001 dan Persiapan MTQ Tahun 2002.
4. Masalah Evaluasi Pelaksanaan P2WKSS.
5. Masalah Pembinaan Kepemudaan dan Pramuka.
6. Masalah Pelaksanaan Talak dan Cerai.
7. Peningkatan Pemantapan Pembinaan Keluarga Sejahtera dan penanggulangan kemiskinan di desa-desa tertinggal.

TRIWULAN III (JULI 2002 S/D SEPTEMBER 2002)

1. Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2002.
2. Rapat-Rapat Kerja dan Peninjauan Dalam Daerah Kabupaten Cirebon oleh Alat Kelengkapan DPRD.
3. Pembahasan Perubahan APBD Tahun 2002.
4. Rapat-Rapat Intern oleh Alat Kelengkapan DPRD.
5. Pembahasan Peraturan Daerah.

MATERI-MATERI PERMASALAHAN DAN KEGIATAN

A. BIDANG PEMERINTAHAN

1. PEMERINTAHAN : Masalah Pembinaan Pemerintahan Umum;
   Masalah Koordinasi antar Instansi/Lembaga

2. KEAMANAN DAN KETERTIBAN : Masalah Penyelenggaraan Pos Kewaspadaan;
Masalah Perkembangan Keamanan Daerah;

3. KEPENDUDUKAN : Masalah Pelaksanaan Yustisi :
- KTP bagi wajib KTP
- Masalah Pelaksanaan Sensus Kependudukan Tahun 2002.

4. PENERANGAN DAN MEDIA MASSA : Masalah Peningkatan Peranan BAKOHUMAS;
Masalah Sosialisasi Berbagai Perda.

5. HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN : Masalah Evaluasi Pelaksanaan Perda;

6. KEPEGAWAIAN DAN APARATUR : Masalah Pembinaan Karier Pegawai dan Kesejahteraannya;

7. PERIZINAN : Masalah Mekanisme dan Prosedur Pemberian Ijin Galian C (A/C);
Masalah Pemberian Ijin Penggalian Sumber Mata Air di bawah tanah (A/C).

8. PERTANAHAN : Masalah Penanganan Kasus Pengaduan Sengketa Tanah;
Masalah Mekanisme dan Prosedur Pembebasan Tanah;
Masalah Pengelolaan Tanah Desa yang menjadi Kelurahan.

9. SOSIAL POLITIK : Masalah BAKOM PKB.

10.PEMBANGUNAN DESA : Masalah Peningkatan Peranan BPD (Badan Perwakilan Desa), LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa) dan PKK;
Masalah Pelaksanaan IDT (A/E).

B. BIDANG PEREKONOMIAN

1. Masalah Usaha Jasa Alat Pertanian (Inventarisasi alat).
2. Pelaksanaan Peningkatan Produksi Perkebunan.
3. Masalah Budi Daya Ternak Domba (PPWT).
4. Usaha/Intensifikasi Tambak Bandeng dan Udang (PPWT).
5. Pengembangan dan Peningkatan Produksi Kehutanan.

6. Budi Daya Agro Foresty.
7. Peningkatan Perluasan Kegiatan Ekonomi Pedesaan.

C. BIDANG KEUANGAN DAN PERUSAHAAN DAERAH

1. Masalah Retribusi Ijin Gangguan (SIUK).
2. Masalah Penerimaan Retribusi Pasar.
3. Masalah Pembinaan Dunia Usaha.
4. Masalah Penerimaan Retribusi Persampahan.
5. Masalah Penerimaan Pajak Penerangan Jalan.
6. Masalah Perkembangan BKPD dan BKD.
7. Masalah Penerimaan Pajak Tontonan dan Keramaian Umum.
8. Masalah Penerimaan Retribusi Peruntukan dan Penggunaan Tanah.
9. Masalah Retribusi Pasar.
10. Evaluasi Penerimaan PADS Triwulan II.
11. Masalah Penerimaan Retribusi Izin Data Informasi Daerah.

D. BIDANG PEMBANGUNAN

1. Masalah Galian C dan Reklamasinya.
2. Masalah Program Lingkungan Hidup.
3. Masalah Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat.
4. Masalah Pelaksanaan Listrik Masuk Desa.
5. Masalah Penyediaan Air Bersih.
6. Masalah Pelaksanaan Program Telkom.
7. Masalah Penanganan Lahan Kritis dan Lahan Tidur.
8. Masalah Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan untuk Wajar Dikdas 9 tahun.
9. Masalah Sarana dan Prasarana Perhubungan Menjelang Natal dan Tahun Baru.
10. Pengembangan Irigasi Pompa (PPWT) dan Jaringan Irigasi Desa
11. Masalah Sarana dan Prasarana Perhubungan Menjelang Lebaran.

E. BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

1. Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat secara umum.
2. Kehidupan beragama dan pelayanan NTCR/Haji Tahun 2002.
3. Pembinaan Kesetiakawanan Sosial.
4. Pembinaan Kesenian dan Kebudayaan.
5. Pelayanan KB dan Kesehatan.
6. Pembinaan Tenaga Kerja dan Perlindungan Tenaga Kerja

TRIWULAN IV (OKTOBER 2002 S/D DESEMBER 2002)

1. Pembukaan Tahun Sidang 2003 dan Penyampaian Evaluasi Kegiatan Hasil Kerja DPRD Tahun 2002;
2. Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2002.
3. Penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2002.
4. Rapat-Rapat Kerja dan Peninjauan Dalam Daerah Kabupaten Cirebon oleh Alat Kelengkapan DPRD.
5. Rapat-Rapat Intern oleh Alat Kelengkapan DPRD.
6. Pembahasan Peraturan Daerah.

MATERI-MATERI PERMASALAHAN DAN KEGIATAN

A. BIDANG PEMERINTAHAN

1. PEMERINTAHAN	: Masalah Pembentukan Dinas/Lembaga/ Unit Kerja baru; Masalah Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa dan Kelurahan.
2. KEAMANAN DAN KETERTIBAN	: Masalah Persiapan Ketertiban Angkutan Lebaran.
3. KEPENDUDUKAN	: Masalah Peningkatan Swadaya Masyarakat
4. PENERANGAN DAN MEDIA MASSA	: Masalah Peliputan dan Penayangan Hasil-hasil Pembangunan
5. HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	: Masalah Pengembangan Kesadaran Hukum dan Pendidikan Tata Usaha Negara
6. KEPEGAWAIAN DAN APARATUR	: Masalah Pembinaan Pegawai pada BUMD Masalah Peningkatan Mutu Sumber Daya Aparatur Pemerintah
7. PERIZINAN	: Masalah Evaluasi Perizinan dan Pelaksanaannya
8. PERTANAHAN	: Masalah Pemberian Hak atas Tanah Pemerintah Masalah Penertiban Tanah-tanah Negara (khususnya tanah pangonan)

9. SOSIAL POLITIK : Masalah Evaluasi Penanggulangan Dampak Sosial Politik dari Situasi Krisis Moneter

10. PEMBANGUNAN DESA : Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Desa

B. BIDANG PEREKONOMIAN

1. Pelaksanaan Program Peningkatan Pendapatan Petani dan Pengusaha Kecil.
2. Pelaksanaan Bantuan Penghijauan (Penyelamatan Hutan, Tanah dan Air).
3. Masalah Penangkapan Ikan Laut dan Budi Daya Nila Merah.
4. Masalah Pembuatan Areal Hutan Pantai dan Kebun Bibit Tanaman Perhutanan.
5. Pembinaan Perlindungan Konsumen dan Informasi Pasar.
6. Pengembangan Usaha Pertanian Agro Industri dan Pemasaran.

C. BIDANG KEUANGAN DAN PERUSAHAAN DAERAH

1. Evaluasi Penerimaan PADS Triwulan III.
2. Masalah Penerimaan Pajak Reklame.
3. Masalah Retribusi Pelayanan Umum.
4. Masalah Penerimaan Lain-lain.
5. Masalah Penerimaan Dinas Perikanan.
6. Masalah Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
7. Realisasi Pajak Penerangan Jalan.
8. Masalah Pembinaan Dunia Usaha.
9. Masalah Pengembangan PDAM.

D. BIDANG PEMBANGUNAN

1. Masalah Pengawasan Program Pemeliharaan dan Pelaksanaan Proyek Jalan dan Jembatan.
2. Masalah Pengawasan Program Perumahan Rakyat.
3. Masalah Pengawasan Program Pemeliharaan dan Pelaksanaan Proyek-proyek Bidang Pengairan.
4. Masalah Pengawasan Pelaksanaan Program Tata Ruang.

E. BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

1. Persiapan Haji Tahun 2003 dan pendayagunaan Zakat Fitrah.
2. Masalah Penyuluhan dan Pembinaan Calon Transmigrasi.
3. Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit dan Puskesmas.
4. Pembinaan Organisasi Wanita (peranan wanitanya).
5. Masalah Pendidikan Secara Umum.
6. Perkembangan PAKEM.

7. Masalah Tenaga Kerja di Perusahaan-perusahaan.
8. Masalah Pemberdayaan Wanita.

Sumber, 28 Januari 2002

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON
Ketua,

KETUA DPRD KABUPATEN CIREBON

H. MASKUB BUNTORO